

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI
PROGRAM BANK SAMPAH DI KELURAHAN SUKARAMI

IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY THROUGH THE
WASTE BANK PROGRAM IN SUKARAMI DISTRICT

Tommy Mahendra¹, Ryvaldo Syaputra², Uci Wulandari³, Septi Purnama Sari⁴,

Sri Lestari⁵, Sari Prantia⁶, Rih Laksmi Utpalasari⁷

^{1*234567} Universitas PGRI Palembang, Indonesia

¹tommyjq00@gmail.com, ²ryvaldosyaputra@gmail.com, ³Uciwulandari955@gmail.com,
⁴septipurnamasari2000@gmail.com, ⁵srilestari4583@gmail.com, ⁶sariprantia23@gmail.com

Article History:

Received: November 07th, 2023

Revised: December 4th, 2023

Published: December 8th, 2023

Abstract: *The aim of this community service is to clarify the process of implementing waste management policies through the waste bank program in Sukarami Village. In this service, a qualitative approach is used, the type of service is qualitative descriptive, and the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. This study will be reviewed from several aspects: (a) responsibility aspect, (b) sustainability aspect, (c) profit aspect, and (d) economic value aspect. The determining factors for the success of the waste management policy in the waste bank program in Sukarami Village include the level of compliance, smooth daily operations and performance. Based on the findings used, the process of implementing waste management policies through the waste bank program in Sukarami District generally includes aspects of responsibility, sustainability aspects, profit aspects and macroeconomic aspects, so it is concluded that economic value aspects are included. Even though it has not been implemented effectively, there are limited landfill facilities, limited human resources, unpaid salaries, and minimal government supervision of the landfill. Obstacles still exist. Determining factors for the success of implementing waste management policies through the waste bank program. This includes the level of compliance, smooth daily operational functions, and performance. Overall, factors such as lack of socialization, lack of training, and the need to improve facilities and infrastructure have not been implemented optimally to achieve the expected goals of the development of the waste banking system itself.*

Keywords: Policy
Implementation,
Waste Management,
Waste Bank

Abstrak

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memperjelas proses penerapan kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Desa Sukarami. Dalam pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis pengabdian deskriptif kualitatif dan teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kajian ini akan ditinjau dari beberapa aspek: (a) aspek tanggung jawab, (b) aspek keberlanjutan, (c) aspek keuntungan, dan (d) aspek nilai ekonomi. Faktor penentu keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah pada program bank sampah di Desa Sukarami antara lain tingkat kepatuhan, kelancaran operasional sehari-hari dan kinerja. Berdasarkan temuan yang digunakan, proses penerapan kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kecamatan Sukarami secara umum mencakup aspek tanggung jawab, aspek keberlanjutan, aspek keuntungan dan aspek makroekonomi, sehingga disimpulkan bahwa aspek nilai ekonomi termasuk di dalamnya. Meskipun belum dilaksanakan secara efektif, terdapat keterbatasan fasilitas TPA, keterbatasan sumber daya manusia, gaji yang belum dibayarkan, dan minimnya pengawasan pemerintah terhadap TPA. Kendala masih ada. Faktor penentu keberhasilan penerapan kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah. Hal ini mencakup tingkat kepatuhan, kelancaran fungsi operasional sehari-hari, dan kinerja. Secara keseluruhan, faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya pelatihan, dan perlunya perbaikan sarana dan prasarana belum dilaksanakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pembangunan, sistem perbankan sampah itu sendiri.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Bank Sampah

PENDAHULUAN

Sampah merupakan sebuah masalah yang seiring terjadi di berbagai negara utamanya negara berkembang seperti Indonesia. Sampah merupakan “bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, bahan bangunan dan besi-besi tua” (Pratiwi, 2018). Adanya masalah sampah seperti ini dapat disebabkan oleh tingginya penduduk yang semakin padat serta semakin menurunnya luas lahan yang dapat dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Sehingga fakta tersebut dapat mengakibatkan peningkatan jumlah produksi. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaannya fasilitas pengelolaan sampah, yang pada akhirnya hal ini akan berdampak pada timbulnya gangguan terhadap lingkungan yang ada. “Lingkungan merupakan gabungan semua hal yang mempengaruhi hidup” (Wiryono, 2013) sehingga, untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting dilakukan pengelolaan terhadap sampah. Kehidupan manusia tidak pernah aman dari sampah karena setiap harinya ribuan orang menghasilkan sampah. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas penduduk, maka jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya juga semakin meningkat. Banyaknya sampah dan jenis sampah yang dihasilkan bergantung pada pola konsumsi masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka jumlah sampahnya semakin besar dan semakin banyak pula jenis sampah yang dihasilkan. Bank Sampah merupakan tempat penyimpanan sampah yang dikelompokkan berdasarkan jenis sampah. Sampah yang disimpan di bank sampah merupakan sampah dengan nilai ekonomi. Cara kerja bank sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lain, dengan nasabah, akuntansi dan manajemen, kalau di bank biasanya kita mengenal

nasabah yang mana. titipan adalah uang, namun pada bank sampah yang dititipkan adalah sampah, mempunyai nilai ekonomi, sedangkan pengelola bank sampah haruslah orang-orang yang kreatif, inovatif dan mempunyai jiwa wirausaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem pengelolaan sampah Bank Sampah bergantung pada rumah tangga, memberikan penghargaan kepada mereka yang berhasil memilah dan mengirimkan sampah dalam jumlah tertentu. Konsep bank sampah berlaku untuk pengelola bank secara umum. Selain sebagai sarana penggerak gerakan penghijauan, pengelolaan sampah juga dapat menjadi sarana edukasi ekonomi bagi masyarakat dan anak-anak. Cara bank sampah juga berdampak membuat masyarakat peduli terhadap masalah kebersihan. Kegiatan pengurangan sampah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas; melakukan kegiatan membatasi timbulan sampah, daur ulang dan penggunaan kembali sampah atau lebih dikenal dengan Reduce, Reuse dan Recycle (3R) melalui Upaya yang cerdas, efisien dan terencana. Namun kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala besar, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap klasifikasi sampah.

Peran bank sampah menjadi penting sejak Pemerintah menerbitkan Peraturan (PP) Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. PP tersebut mengatur kewajiban produsen untuk melakukan kegiatan 3R dengan menghasilkan produk menggunakan kemasan biodegradable dengan proses alami; Hal ini menghasilkan limbah sesedikit mungkin; Menggunakan bahan produksi yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali; dan/atau membuang limbah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan digunakan kembali. Melalui keberadaan bank sampah, produsen dapat bekerja sama dengan bank sampah yang sudah ada sehingga dapat mengolah sampah dari produk yang dihasilkannya sesuai amanat PP. Pengelolaan limbah/sampah mengacu pada semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani limbah mulai dari pembangkitan hingga pembuangan akhir. Secara umum kegiatan pengelolaan sampah meliputi: pengendalian timbulan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Pengelolaan sampah di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, di satu sisi pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, disisilain pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah spesifik merupakan tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga meliputi pengurangan sampah dan pembuangan sampah, pengurangan sampah meliputi pembatasan produksi sampah, daur ulang sampah, dan penggunaan kembali sampah. Dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku ekonomi dan masyarakat mempunyai peran masing-masing. Konsep bank sampah berlaku untuk pengelola bank secara umum. Selain sebagai salah satu cara untuk menerapkan gerakan hijau, pengelolaan sampah juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat tentang cara menabung untuk masyarakat dan anak-anak. Metode perbankan sampah juga membantu menjaga kepedulian masyarakat terhadap kebersihan.

METODE

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Desa Sukarami dapat mencakup berbagai teknik filantropi untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan program. Berikut adalah beberapa metode doa yang dapat Anda gunakan:

1. Penjangkauan dan Edukasi:
 - a. Melakukan kampanye penjangkauan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.
 - b. Memanfaatkan berbagai media komunikasi seperti poster, brosur, dan media sosial untuk menyampaikan informasi terkait program bank sampah.
 - c. Melibatkan perwakilan masyarakat dan pemimpin opini untuk memberikan dukungan dan contoh positif dalam praktik pengelolaan sampah.
2. Pelatihan Pengelolaan Sampah: Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara memilah sampah dengan baik dan efisien.
 - a. Membantu Anda memahami manfaat daur ulang dan pengelolaan sampah organik.
 - b. Mempekerjakan ahli pengelolaan sampah untuk memberikan informasi teknis kepada staf bank sampah dan masyarakat.
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana:
3. Harap memastikan bahwa tempat sampah terpisah untuk setiap jenis sampah (plastik, kertas, logam, organik) dipasang di sekitar desa Skarami.
 - a. Menyediakan fasilitas pembuangan limbah yang nyaman dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum.
 - b. Mempromosikan penggunaan kantong plastik ramah lingkungan.
 - c. Partisipasi Aktif Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah.
4. Menyelenggarakan kegiatan gotong royong menjaga kebersihan lingkungan dan tempat umum bebas sampah.
 - a. Membentuk kelompok relawan untuk mendukung operasional bank sampah.
 - b. Monitoring dan Evaluasi:
 - c. Membentuk tim monitoring yang secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bank sampah.
5. Mendata jumlah sampah yang dikumpulkan, tingkat partisipasi masyarakat, dan dampak positif program terhadap lingkungan.
 - a. Menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki dan menyesuaikan program sesuai kebutuhan.
 - b. Inovasi dan Pengembangan Program:
 - c. Mempromosikan inovasi dalam pengelolaan sampah, termasuk:.
6. Pemanfaatan teknologi untuk memfasilitasi proses pemilahan sampah dan program insentif bagi mereka yang berpartisipasi dalam program perbankan sampah.
 - a. Melakukan penelitian berkelanjutan untuk menemukan cara baru dan lebih

efektif dalam mengelola sampah.

- b. Kerjasama dengan pihak eksternal: Menjalin kerja sama dengan pihak swasta, lembaga pendidikan, dan LSM untuk mendukung program pengelolaan sampah.
- c. Melibatkan bisnis lokal dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) lingkungan

PEMBAHASAN

Pada tahap kebijakan publik, implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting yang perlu dilalui untuk mencapai hasil kebijakan. Tentunya pada fase implementasi ini akan ditemukan variabel-variabel yang berkaitan dengan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan yang akan sangat berguna untuk memperbaiki dan menyempurnakan fase-fase implementasi kebijakan yang akan datang. Pengelolaan sampah dilakukan oleh Mahasiswa KKN kecamatan sukarami, Memastikan praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta mengubah sampah menjadi sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di bawah ini prinsip pengelolaan sampah Program Bank Sampah Mahasiswa KKNPGRI di kecamatan sukarami Palembang :

1. Asas Tanggung Jawab, Kebijakan bank sampah ini diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan merupakan wujud kepedulian sosial, sehingga sampah dapat dikelola dengan baik tanpa harus langsung dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Kemudian, tugas pemerintah adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang penerapan pedoman pengurangan, dan daur ulang sampah berbasis masyarakat melalui banksampah dikelurahan Sukarami. Berikut tanggungjawab yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan kebijakanyang sudah ditetapkan maka berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RT 20 menjelaskan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan program bank sampah hanyasebatas mengelolabukan hanya untuk menjual kembali.
2. Asas Berkelanjutan, Wujud dari asas berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan maka dapat dijelaskan bahwa untuk pembangunan berkelanjutan lebih mengarah pada bagaimana keaktifan bank sampahdapat terus aktif sampai seterusnya sehingga nantinya bisa juga ke depan untuk dibangunkannya bank-bank sampah lainnya. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa aspek berkelanjutan sudah dilakukan oleh pemerintah desa dengan membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dilihat dari belum adanya kelanjutan mengenai bank-bank sampah khususnya di RT 20 Kelurahan Sukarami, dilihat dari pembangunan-pembangunan yang sudah terbentuk namun tidak jalan. Sehingga dalam mengatasi hal ini dibutuhkan peran pemerintah serta masyarakat untuk dapat melaksanakan kebijakan program ini, karena dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan mencapai dampak-dampak yang diinginkan terletak pada kualitas kepemimpinan yang dimiliki dari suatu organisasi yang disertai tugas memimpin dalam organisasi tersebut. Selain itu dikatakan bahwa untuk aspek berkelanjutan masih kurangnya perlengkapan mengenai fasilitas yang ada di bank sampah, sehinggamasih kurangnya sarana danprasarana yang mendukung kebijakanprogram bank sampah ini.

3. Manfaat, Berikut wujud asas manfaat yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN PGRI Palembang di kec. Sukarami, berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan maka menunjukan asas manfaat dilakukan dengan bekerja sama dengan pegadaian untuk menjadikan masyarakat lebih rajin menabung. Sehingga hasil tersebut bisa ditukarkan menjadi emas. Bahwa manfaat hanya berlaku untuk ketersediaanya sarana prasarana, dirasakan oleh masyarakat karena sampah ini dapat merubah paradigma sampah yang bias langsung dibuang tetapi ini bias dimanfaatkan dan ditukarkan menjadi tabungan ataupun nominal yang lebih besar. Kemudian dari hasil pengamatan juga para nasabah sudah melakukan pemilihan terlebih dahulu menabung di bank sampah sehingga lebih memudahkan untuk proses pelayanan bank sampah.
4. Nilai Ekonomi, Sampah menjadi energi yang berguna bagi masyarakat luas dan dapat meningkatkan nilai ekonomis sampah. Sampah dapat bernilai ekonomi bila dikelola dengan bijak dan melibatkan semua elemen masyarakat. Bahwa untuk nilai ekonomi pemerintah sudah berupaya untuk bagaimana mengolah sampah ini dapat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga akan menumbuhkan rasa semangat terhadap masyarakat untuk tidak langsung membuang sampah yang masih mempunyai nilai ekonomi. Bahwa nilai ekonomi, pemerintah hanya memfasilitasi masalah sarana dan prasarana kemudian hal lainnya diserahkan kepada pengelola. Karena program banksampah hanya lebih mencari nasabah sebanyak-banyaknya, mengedukasi mengenai pengelolaan sampah sehingga ada pun manfaat ekonominya akan diputar kembali seperti bank konvensional pada umumnya. Bahwa untuk nilai ekonomi sudah dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak seperti pegadaian sehingga membawa dampak yang bagus, sehingga sampah mempunyai nilai ekonomi. Selanjutnya, pernyataan lain yang diungkapkan oleh pengurus bank sampah, dan memiliki patokan harga yang memuaskan bagi setiap jenis-jenis sampah yang akan ditabung.

Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan peneliti bahwa terdapat patokan harga perkilogramnya sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Harga Bank Sampah

Nama Barang	Kilogram	Harga
1.Plastik campur	1	Rp. 2000
2.Plastik gelas (putih)	1	Rp. 2.500
3.PlastikAqua bersih	1	Rp. 5.000

4. Plastic aqua kotor	1	Rp. 3.500
5. Botolbodong campur	1	Rp. 1.800
6. Kardus	1	Rp. 800
7. Kertas campur	1	Rp. 1.000
8. Almunium	1	Rp. 5.000
9. Botol (sejenis fresh)	1	Rp. 500
10. Kaleng	1	Rp. 1.000
11. Galon aqua	1	Rp. 5.000
12. Botolmarjan dll	1	Rp. 2.500
13. Gelas	1	Rp. 4.000

Faktor-faktor yang menentukan Keberhasilan Pengelolaan Sampah :

Kemudian pada pengabdian ini, mahasiswa KKN menggunakan teori Randall. B. Ripley and Grace A Franklin dalam tahir 2014:95), ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam pengelolaan bank sampah yaitu, (a). Tingkat kepatuhan implementor bank sampah terhadap ketentuan Permen LH No.13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Reduce, reuse dan Recycle, (b). Kelancaran rutinitas fungsi, (c). Kinerja Tingkat Kepatuhan Tingkat kepatuhan implementor mengenai komunikasi yang dibangun terhadap program bank sampah sesuai dengan ketentuan Permen Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle, berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan maka, berdasarkan hasil wawancara dengan RT 20 Kelurahan Sukarami. Dalam hal ini, dalam melaksanakan suatu kebijakan atau rencana, harus didukung oleh pelaksana kebijakan yang mempunyai untuk menjamin keberhasilan kebijakan tersebut, ini harus didokumentasikan atau diungkapkan dengan benar dibagian ini. Proses penerapan kebijakan sebenarnya tidak hanya melibatkan tindakan badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan mempromosikan kepatuhan dengan kelompok sasaran, tetapi juga jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan social yang secara langsung terkait dengan tindakan yang pada akhirnya terlibat dan pihak-pihak yang terlibat. Para pihak pada akhirnya akan mempengaruhi tujuan kebijakan, baik itu negative maupun positif. Implementasi dalam layanan juga merupakan hal yang sangat penting dalam kebijakan. Dapat dikatakan bahwa pelaksana tersebut adalah pemberi dan pemberi layanan kepada masyarakat dalam program, Selain itu pelaksanaan program juga merupakan standard untuk mengukur derajat pelaksanaan program. Kelancaran Rutinitas Fungsi Kelancaran rutinitas fungsi dalam hal ini berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan mengenai program bank sampah, adapun dalam pengabdian ini sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan maka, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 20, bahwa kelancaran rutinitas fungsi untuk mensosialisasikan program bank sampah sudah dilakukan namun terkendala karena situasinya masih pandemi. Sehingga belum sepenuhnya optimal. Sehingga untuk saat ini

sosialisasi hanya masih sebatas lewat media sosial. Dari penjelasan informan di atas, menunjukkan bahwa kelancaran rutinitas fungsi untuk mensosialisasikan program bank sampah sudah dilakukan. Namun, dapat dilakukan bahwa strategi bank sampah untuk mendorong pembangunan bank sampah saat ini hanya sebatas penyebaran brosur, dan belum adanya partisipasi masyarakat dalam sosialisai yang intens tentang simpanan bank sampah.

Terwujudnya Kinerja Dalam pelaksana kebijakan, diperlukan dukungan kinerja perangkat, seperti peningkatan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut menjadi sumber daya yang dapat berdampak positif dan bermanfaat bagi keberhasilan pelaksana kebijakan atau rencana. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu untuk mengimplementasikan strategi agar dapat berjalan dengan baik, optimal, efektif dan efisien. Sesuai dengan tujuan penelitian, untuk mengetahui proses pengelolaan sampah melalui program bank sampah menggunakan metode penelitian yang sudah diterapkan dalam pengabdian ini, serta memperhatikan semua indikator- indikator dalam bentuk implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peneliti berusaha menggali dengan melakukan pengamatan dan juga wawancara langsung dengan Pemerintah desa, Pengurus Bank Sampah, dan Masyarakat penabung Sampah yang terkait dengan pengelolaan sampah melalui program bank sampah. Data yang dikumpulkan melalui observasi lapangan dan selanjutnya dideskripsikan oleh peneliti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yaitu pembahasan data-data yang diperoleh di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1).Implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh masyarakat melalui Program Bank Sampah, didasarkan pada berbagai aspek antara lain aspek tanggung jawab, aspek keberlanjutan , aspek keuntungan dan nilai ekonomi secara keseluruhan. Aspek-aspek, meskipun secara umum terdokumentasi dengan baik, tidak diterapkan secara efektif, termasuk pembatasan pembangunan ditempat pembuangan sampah, terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya pembayaran gaji, dan pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah. (2). Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan sampah melalui Program Bank Sampah meliputi tingkat kepatuhan, rutinitas fungsional, dan kinerja. Berdasarkan temuan umum, unsur-unsur berikut ini belum dilaksanakan secara optimal. Kurangnya sosialisasi, kurangnya pelatihan, dan perlunya peningkatan sarana dan prasarana. untuk dapat memenuhi harapan tujuan dari sistem perbankan sampah itu sendiri. Kesimpulan pada bank sampah yaitu masyarakat biasa mengurangi limbah sampah dan bisa penggunaan kembali sampah yang bisa dijadikan bahan daur ulang sampah plastic, kaleng, besi dan limbah sampah basah yang bisa dijadikan pupuk organik pada tumbuhan. Selain itu bank sampah juga bias jadi bahan tempat sampah yang baik digunakan untuk kegunaan masyarakat Kelurahan Sukarami agar bersih dari sampah plastik maupun sampah kertas dan sampah basah lainnya. Selain Mahasiswa\i KKN Upgri Palembang Kelurahan Sukarami juga menyediakan tempat sampah namun bukan bank sampah yang memisahkan antara jenis sampah– sampah seperti sampah plastik, kertas, kaleng, dan sampah basahan oleh karna itu kami Mahasiswa\i Kkn Upgri Palembang mengadakan bank sampah daur ulang untuk Kelurahan Sukarami agar masyarakat tahu

bahwa sampah juga bisa didaur ulang menjadi bahan yang berharga. Karna sampah plastik dan kaleng bisa di jual kembali sedangkan sampah basah bisa dijadikan bahan pupuk tanaman yang di fermentasi dan bisa menyuburkan tanaman organik maupun non organik karena tidak berbahaya karna pupuk ini alami dari daur ulang fermentasi bahan dari dapur kita sendiri dan tahu sendiri bahan yang di buat pupuk untuk tanaman kita jadi sehat untuk di konsumsi masyarakat maupun kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasidan Pelayanan Publik*, 9(4), 850-868.
- Dewi, Puspita, Rinti (2019). Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah di Gampong Ateuk Pahlam Kecamatan Baiturahman Banda Aceh. Universitas Islam Ar-Raniry
- Pratiwi, Dhita. (2018). Implementasi Kebijakan Bank Sampah dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
- Purnamasari, L. (2021). Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah. *PADMA*, 1(2), 169-179.
- Suryani, A. S. (2014). Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(1), 71

